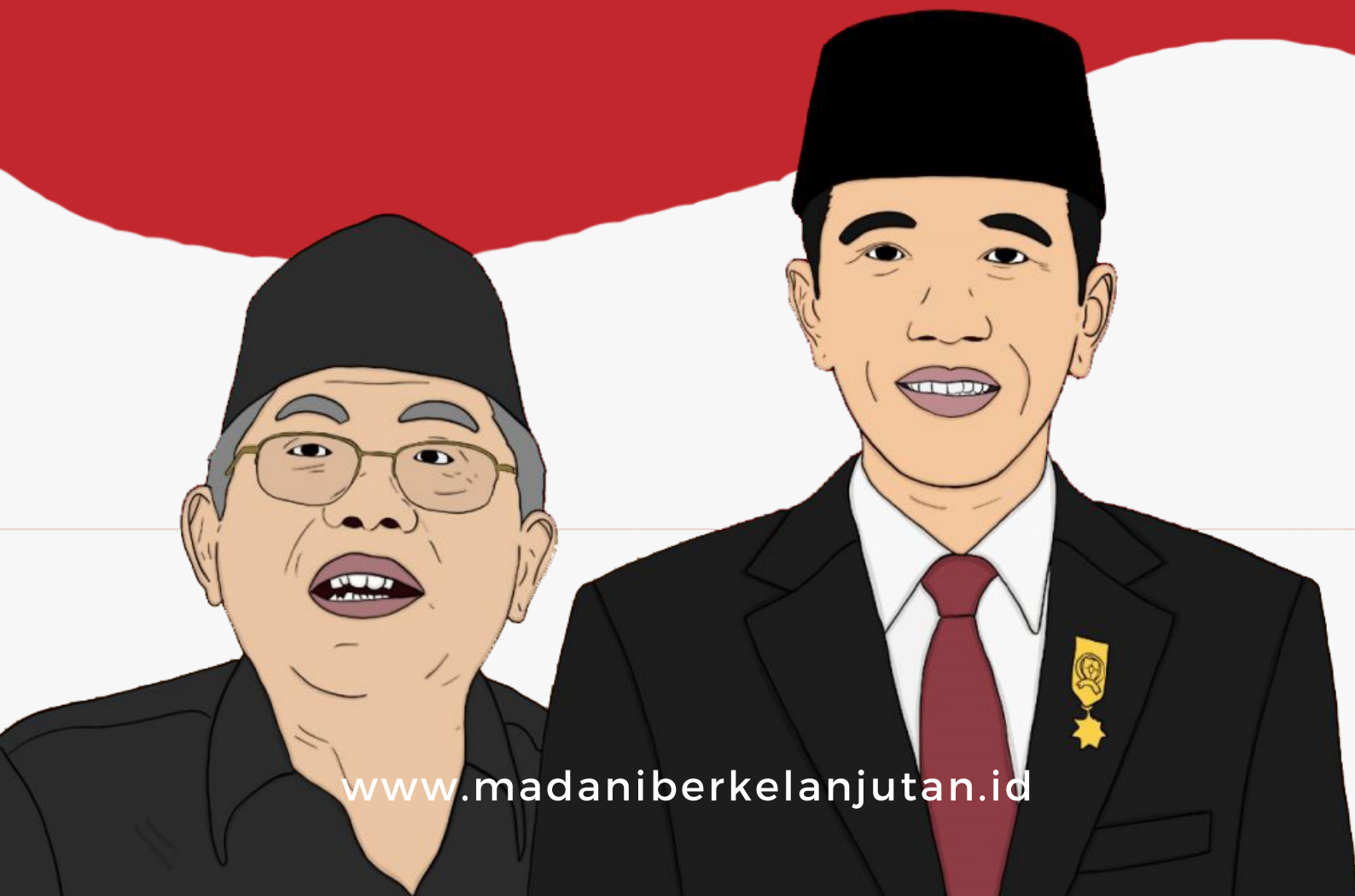


Madani

ANALISIS DOKUMEN VISI & MISI JOKO WIDODO-MA'RUF AMIN 2019-2024

Oktober 2018



www.madaniberkelanjutan.id

Analisis Visi dan Misi Jokowi-Ma'ruf terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kajian ini memaparkan analisis terhadap dokumen visi-misi Jokowi-Ma'ruf terkait lingkungan hidup dengan fokus pada 5 isu utama yaitu pengelolaan hutan dan gambut secara berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, penegakan hukum, perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi baru terbarukan (EBT). Studi ini mengidentifikasi poin-poin program aksi yang ditemukan dalam visi dan misi Jokowi dan Ma'ruf yang berkaitan dengan isu-isu tersebut.

Dari hasil kajian, didapatkan beberapa temuan utama, yaitu: (i) **Visi Misi Jokowi-Ma'ruf secara umum mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan**, terutama yang tercantum dalam misi keempat tentang Capaian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi keempat ini memiliki 3 program aksi dan 13 butir kebijakan yang fokus pada kebijakan tata ruang yang terintegrasi, mitigasi perubahan serta penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, (ii) Berdasarkan kajian terhadap 5 isu tersebut, maka dari 260 butir penjabaran program aksi visi misi Jokowi-Maruf, hanya **sekitar 20 persen yang membahas isu terkait lingkungan hidup yang berkelanjutan**. Sebanyak 17 persen diantaranya adalah isu terkait pengelolaan hutan dan gambut yang berkelanjutan, ketimpangan penguasaan lahan, dan penegakan hukum, sedangkan isu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta energi baru terbarukan (EBT) hanya berkisar 3 persen dan (iii) **Permasalahan yang belum diakomodir** terkait dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan meliputi : tata kelola perkebunan kelapa sawit, pemberhentian deforestasi, pengelolaan konflik tenurial dan penataan desa di kawasan hutan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi sumber daya alam. Selain itu terkait Perlindungan hak masyarakat adat, tidak ditemukan pembahasan tentang Rancangan Undang-undang masyarakat adat dan hutan adat serta penanganan polusi, dan tambang di sektor EBT. (iv) **Perlu Komitmen Jokowi-Ma'ruf** dalam melanjutkan kebijakan pada periode sebelumnya terutama terkait dengan 14 (empat belas) butir kebijakan di sektor kehutanan, 2 (dua) komitmen reforma agraria, 6 komitmen terkait masyarakat adat serta evaluasi, 9 Komitmen terkait EBT. Selain itu perlu kebijakan yang mengakomodir terkait dengan pemberhentian deforestasi, pemberhentian dan evaluasi izin sumber daya alam serta pengelolaan konflik tenurial.

Umum

- Sejak ditetapkan oleh KPU pada September 2018 lalu, Calon Presiden dan Wakil Presiden telah mulai merumuskan tim kampanye dan visi dan misi mereka untuk lima tahun ke depan (2019-2024). Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut satu (1), Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) bersama tim sukses merumuskan gagasan mereka dalam visi sebagai berikut: "Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
- Dalam bagian pendahuluan, Jokowi dan Ma'ruf menyebutkan capaian-capaian yang telah dicapai pada masa pemerintahan Jokowi yang pertama, mulai dari transformasi pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, pengalokasian dana desa, pembangunan infrastruktur, serta keberpihakan yang besar kepada 40 persen masyarakat di lapisan terbawah.
- Untuk menjalankan visi di atas, Jokowi-Ma'ruf merumuskan 9 (sembilan) misi yang merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan NawaCita I, yang meliputi:
 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
 9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- Untuk menjalankan kesembilan misi tersebut, Jokowi-Maruf menyusun berbagai program aksi yang dapat dilihat di Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1: Penjabaran Misi dan Program Jokowi-Ma'ruf Tahun 2019-2024

No	Misi	Program
1.	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak
		Mengembangkan reformasi sistem kesehatan
		Mengembangkan reformasi sistem pendidikan
		Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi
		Menumbuhkan kewirausahaan
		Menguatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
2.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing	Memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila
		Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan Infrastruktur
		Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0
		Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru
		Mempertajam reformasi struktural dan fiskal
		Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan
3.	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Redistribusi aset demi pembangunan berkeadilan
		Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM Koperasi
		Mengembangkan ekonomi kerakyatan
		Mengembangkan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial

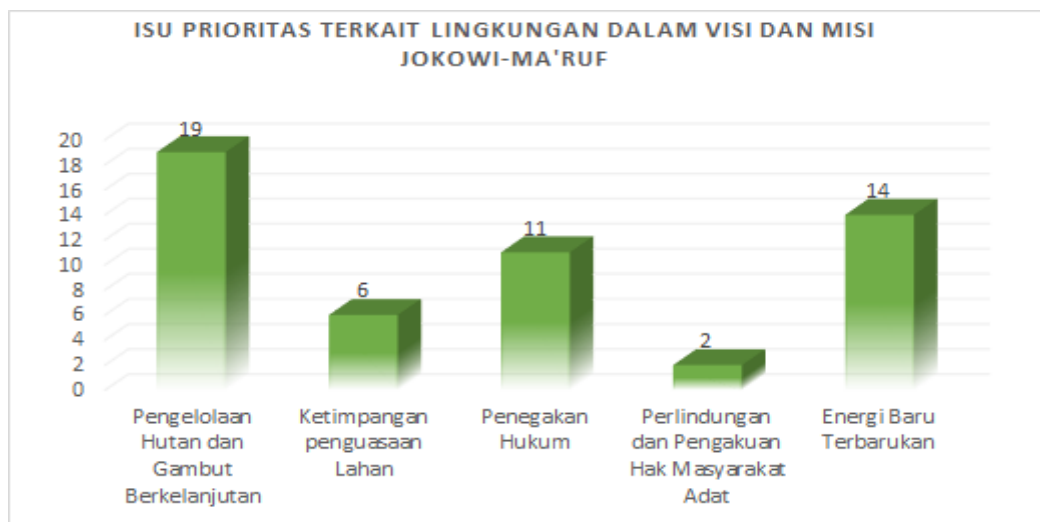
		.Melanjutkan pemanfaatan dana desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di pedesaan
		Mempercepat penguatan ekonomi keluarga
		Mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah
4.	Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi
		Mitigasi perubahan iklim
		Penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup
5.	Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian bangsa	Pembinaan ideologi Pancasila
		Revitalisasi revolusi mental
		Restorasi toleransi dan kerukunan sosial
		Mengembangkan pemajuan seni-budaya
		Meningkatkan pelopor pemuda dalam pemajuan kebudayaan
		Mengembangkan olahraga untuk tumbuhkan budaya sportivitas dan berprestasi
6.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Melanjutkan penataan regulasi
		Melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum
		Pencegahan dan pemberantasan korupsi
		Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM
		Mengembangkan budaya sadar hukum
7.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif
		Melanjutkan transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional
		Melanjutkan reformasi keamanan dan intelijen yang profesional dan terpercaya
8.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Akuntabilitas demokrasi Pancasila
		Mengembangkan aparatur sipil negara yang profesional

		Reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi
		Reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien
		Percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Reformasi pelayanan publik
9.	Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan	Menata hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis
		Meningkatkan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa

Sumber: Dokumen Visi dan Misi Jokowi-Ma'ruf, 2018

5 (Lima) Isu Prioritas Terkait Lingkungan

Gambar 1. Isu-isu terkait lingkungan yang paling banyak disebutkan dalam dokumen visi dan misi Jokowi-Ma'ruf



Sumber: Dokumen Visi dan Misi Jokowi-Ma'ruf, 2018

- Berdasarkan kajian terhadap 5 isu prioritas terkait lingkungan di atas, terlihat bahwa pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan (19 butir), energi baru terbarukan (14 butir), dan penegakan hukum (11 butir) menjadi isu yang paling banyak dibahas dalam dokumen Visi dan Misi Jokowi-Ma'ruf. Pembahasan isu ini sekitar 17 persen dari total butir program aksi Jokowi-Maruf yang berjumlah 650 butir.
- Perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat serta ketimpangan penguasaan lahan, dibahas hanya 8 butir atau 3 persen dari total butir program aksi Jokowi-Ma'ruf.

Pengelolaan Hutan dan Gambut yang Berkelanjutan

- **Kondisi Hutan di Indonesia.** Sampai bulan Desember 2017, Kawasan hutan Indonesia di darat diklaim seluas 120,6 hektare (63 persen dari luas daratan Indonesia). Sebagian besar Kawasan hutan di Indonesia diklasifikasikan sebagai hutan produksi yang memiliki luas mencapai 68,8 juta Ha atau 57 persen dari keseluruhan kawasan hutan. Hutan ini dapat digunakan untuk pemanfaatan kayu seperti pembalakan, hutan tanaman dan restorasi ekosistem. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam sektor hutan meliputi pelepasan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan baru, perlindungan hukum hutan alam yang berada di luar Kawasan hutan (6,9 juta hektare), kebijakan pelepasan hutan (terutama 12,8 juta Ha hutan produksi yang telah dialokasikan sebagai hutan produksi konversi), kebijakan pertukaran lahan yang memiliki potensi deforestasi yang serius.
- **Lahan Gambut di Indonesia.** Pemerintah memperkirakan luas lahan gambut di Indonesia saat ini adalah 15 juta Ha. Selain itu, terdapat istilah KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) atau ekosistem gambut seluas 24,14 hektare. Sekitar 23,96 hektare (hampir keseluruhan) ekosistem gambut nasional berada dalam kondisi rusak dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang, hingga parah dan sangat parah.
- **Komitmen sebelumnya.** Pada Pilpres 2014, Jokowi-JK menyampaikan 14 (empat belas) butir komitmen untuk penguatan sektor kehutanan (lihat pada tabel 2). Dalam visi-misi sebelumnya, Jokowi-JK sangat tegas dan jelas menyebutkan berbagai angka target terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, pada visi-misi 2019-2024, Jokowi-Ma'ruf tidak lagi menyebutkan angka-angka target secara tegas dalam penjabaran visi-misinya terkait hutan dan lahan. Selain itu, terdapat pula beberapa komitmen yang dihilangkan, seperti: penyediaan data sumber daya hutan secara *de facto* dan *de jure*, penyelesaian konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perizinan, dan pelestarian hutan dan perlindungan 20,63 juta ha sisa areal yang masih berhutan.
- **Visi Misi Jokowi-Maruf ke depan.** Pada visi dan misi periode ini, hutan dan gambut secara khusus dibahas pada Misi keempat yaitu Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Terdapat 3 program aksi (Kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, serta penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup) dan 13 butir kebijakan (lihat tabel 2).
- **Rekomendasi.** Beberapa masalah terpenting yang belum diakomodir dalam visi dan misi ini adalah upaya untuk pemberhentian deforestasi, pengelolaan perkebunan sawit, dan pemulihan ekosistem hutan dan gambut.

Tabel 2. Perbandingan Penjabaran Misi dan Program Jokowi-JK 2104 dan Jokowi-Ma'ruf 2019 terkait Hutan, Lahan, dan Lingkungan Hidup

No	Visi dan Misi 2014 (Jokowi-JK)	Visi dan Misi 2019 (Jokowi-Ma'ruf)
1.	Pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif terhadap pelaku illegal logging.	Melanjutkan kebijakan satu peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang
2.	Pengembangan tata hutan kesepakatan	Pengendalian dan pengawasan kepatuhan dan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangannya
3.	Pengembangan industri hasil hutan dan produk non kayu yang ramah lingkungan	Pencegahan kebakaran hutan
4.	Evaluasi dan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari.	Penanaman kembali lahan-lahan kritis

5.	Pemeliharaan proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan	Pengembangan energi terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan
6.	Pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Melanjutkan konservasi lahan gambut
7.	Tersedianya data sumber daya hutan secara <i>de facto</i> dan <i>de jure</i> serta dapat memberikan kepastian berusaha berkeadilan.	Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan
8.	Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perizinan	Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat
9.	Tertib peredaran hasil hutan dan pencegahan kebakaran dan <i>illegal logging</i> .	Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau
10.	Peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan rakyat, hutan tanaman industri, agroforestry dan hutan kemasyarakatan	Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta daerah aliran sungai (DAS)
11.	Pelestarian hutan pelestarian dan perlindungan 20,63 juta ha sisa areal yang masih berhutan serta perlindungan flora dan fauna yang terancam punah	Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta percepatan pembangunan pusat pengolahan limbah B3 secara terpadu
12.	Rehabilitasi 100,70 juta Ha areal tidak berhutan, hutan tidak produktif dan lahan kritis.	Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan akibat sampah plastik serta mendorong berkembangnya industri daur ulang
13.	Penataan rencana pemanfaatan 1,99 juta ha areal hutan yang belum terdata	
14.	Pemenuhan kebutuhan hasil hutan kayu dalam negeri 46,3 m3/tahun secara bertahap	

Ketimpangan Penguasaan Lahan

- **Kondisi saat ini.** Isu ini terkait dengan permasalahan konflik agraria, kemiskinan dan pengelolaan desa di Kawasan hutan, dan reforma agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2016, telah terjadi 1.174 kasus konflik agraria seluas 4.256.434 hektare dan melibatkan 301.346 Kepala Keluarga (KK). Selain itu juga terdapat 1,7 juta KK miskin di sekitar Kawasan hutan.
- **Komitmen sebelumnya.** Pada visi-misi sebelumnya, Jokowi memiliki 2 (dua) poin komitmen yaitu 1) *access and asset reform* pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha dan perhutanan sosial 12,7 juta Ha, 2)

meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 Ha per KK tani, dan pembukaan 1 juta lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

- **Visi Misi Jokowi-Maruf ke depan.** Pada periode ini, Jokowi dan Ma'ruf fokus pada kebijakan untuk melanjutkan agenda reforma agraria, sebagaimana disebutkan dalam penjabaran misi ketiga tentang pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pada poin 3.1 disebutkan bahwa: 1) mereka akan mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran, guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, 2) melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif, 3) mempercepat percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa atas tanah dan 4) meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan dan legalisasi tanah perkebunan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani perkebunan rakyat meningkat.
- **Rekomendasi.** Beberapa masalah terpenting yang belum diakomodir dalam visi dan misi ini adalah terkait solusi penanganan konflik agraria dan tata kelola desa di Kawasan hutan.

Tabel 3. Perbandingan Penjabaran Misi dan Program Jokowi-JK 2104 dan Jokowi-Ma'ruf 2019 terkait Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

No	Visi dan Misi 2014 (Jokowi-JK)	Visi dan Misi 2019 (Jokowi-Ma'ruf Amin)
1	Pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui <i>land reform</i> dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha dan perhutanan sosial 12,7 juta Ha.	Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran, guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi
2	Meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 Ha per KK tani, dan pembukaan 1 juta lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.	Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif
3		Mempercepat percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa atas tanah
4		Meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan dan legalisasi tanah perkebunan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani perkebunan rakyat meningkat

Penegakan Hukum

- **Kondisi saat ini.** Isu ini terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi perizinan sumber daya Alam serta mekanisme pengawasan. Analisis FWI tentang sebaran hutan alam di dalam konsesi mengungkapkan bahwa sekitar 3,9 juta hektare hutan alam berada di dalam konsesi IUPHHK-HA, 2,7 juta hektare di dalam wilayah tumpang tindih, 2,2 juta hektare berada di dalam konsesi pertambangan, 0,87 juta hektare di dalam konsesi hutan tanaman industri, dan 0.7 juta hektare di dalam perkebunan sawit. Mengingat luasnya hutan alam di dalam konsesi, diperlukan penguatan upaya-upaya penegakan hukum untuk melindungi Kawasan tersebut.
- **Komitmen sebelumnya.** Pada visi dan misi sebelumnya, Jokowi secara tegas menyebut tentang penegakan hukum lingkungan, Pemberantasan penebangan liar dan penambangan liar
- **Visi Misi Jokowi-Maruf ke depan,** Jokowi-Ma'ruf tidak secara tegas menyebutkan tentang korupsi terkait dengan sumber daya alam. Dalam Misi keenam, mereka hanya menyebutkan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu akan melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi **yang fokus pada perizinan** dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- **Rekomendasi.** Perlu sebuah butir yang menyebutkan dengan tegas tindakan penegakan hukum untuk korupsi di sektor sumber daya alam, baik terkait perizinan di kawasan hutan, tambang, dan lainnya.

Tabel 4. Perbandingan Misi dan Program Jokowi-JK 2104 dan Jokowi-Ma'ruf 2019 terkait Penegakan Hukum

No	Visi dan Misi 2014 (Jokowi-JK)	Visi dan Misi 2019 (Jokowi-Ma'ruf Amin)
1.	Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perizinan.	Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
2.	Evaluasi dan penataan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari.	

Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat

- **Kondisi saat ini.** Masih ada banyak tantangan dalam memperjuangkan hak masyarakat adat. *Pertama*, berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat masih menggantung. Sampai 2018, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat 262 kasus perampasan wilayah adat dan kriminalisasi masyarakat adat. *Kedua*, target pemerintah mempercepat penetapan status hutan adat sesuai mandat Putusan MK 35/2012 belum tercapai meskipun ada kemajuan. Pemerintah berkomitmen menetapkan hutan kelola masyarakat termasuk hutan adat sebesar 12,6 juta hektare. Sayangnya, hingga kini, untuk hutan adat hanya berhasil menetapkan 17.000-an hektare. *Ketiga*, belum ada desa adat ditetapkan pemerintah. Dari 133 desa adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah, belum satupun mendapatkan registrasi dan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. *Keempat*, peraturan perundang-undangan soal masyarakat adat masih tumpang tindih dan saling menyandera. Belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat bahkan

menjadi penyebab utama pengabaian dan kekerasan terhadap masyarakat adat. *Kelima*, pembahasan RUU Masyarakat Adat terkesan tidak serius.[2]

- **Komitmen sebelumnya.** Pada Pilpres 2014, Jokowi memiliki 6 (enam) prioritas utama dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat yang diformulasikan secara rinci, di antaranya peninjauan kebijakan, legislasi UU terkait masyarakat adat, pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan penyelesaian konflik. Enam poin ini dijadikan simbol politik oleh Presiden Jokowi saat pencalonan pada Pilpres 2014 sebagai strategi guna meraih simpati dan dukungan masyarakat adat.
- **Visi Misi Jokowi-Maruf ke depan.** Pada visi dan misi 2019 bersama Ma'ruf Amin, hak masyarakat adat hanya ditumpangkan pada Misi keenam terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Di sana disebutkan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal spek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari tanpa perincian seperti sebelumnya. Selain itu, pada penjabaran misi ke-4 juga disebutkan peningkatan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, namun tanpa perincian program.
- **Rekomendasi :** Perlu tindak lanjut terhadap komitmen sebelumnya seperti 1) meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber -sumber agraria, 2) melanjutkan proses legislasi RUU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, 3) Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU pertanahan dan lain-lain, 4) memastikan penerapan UU Desa 6/2014 berjalan.

Tabel 5. Perbandingan Penjabaran Misi dan Program Jokowi-JK 2104 dan Jokowi-Ma'ruf 2019 terkait Hak Masyarakat Adat

No	Visi dan Misi 2014 (Jokowi-JK)	Visi dan Misi 2019 (Jokowi-Ma'ruf Amin)
1.	Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber -sumber agraria	Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal spek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari
2.	Melanjutkan proses legislasi RUU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap akhir	Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat
3.	Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU pertanahan dan lain-lain. berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012	

4.	Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.	
5.	Membentuk komisi independen yang diberi mandat khusus oleh presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan	
6.	Memastikan penerapan UU Desa 6/2014 berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat	

Energi Baru Terbarukan

- **Kondisi saat ini.** Presiden Jokowi menargetkan penggunaan energi terbarukan pada 2025 meningkat tiga kali lipat dari saat ini atau mencapai 23 persen dari total konsumsi bahan bakar nasional. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif sehingga membuka ruang pemanfaatan energi terbarukan yang lebih besar
- **Komitmen sebelumnya.** Pada visi-misi sebelumnya, Jokowi-JK memiliki 9 (sembilan) poin komitmen dalam membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional. Dalam pengembangan strategi jangka panjang akan mengubah sistem harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai perekonomian atau sesuai dengan risiko investasi dalam sektor ini. Dalam strategi jangka pendek, kontribusi terhadap pengurangan subsidi energi perlu dimasukkan ke dalam perhitungan perekonomian melalui penggunaan tenaga panas bumi dengan tenaga air, biofuel dan biomassa yang diproduksi melalui pembentukan tata kelola energi terbarukan yang efisien efektif. Selain itu akan dibentuk badan usaha khusus seperti Bulog yang tugasnya memperkuat industri biofuel dan terjamin terjadinya perdagangan biofuel yang efisien melalui pembentukan tata kelola biofuel yang efisien dan efektif.
- **Visi misi saat ini.** Pada visi-misi 2019, Jokowi-Ma'ruf berkomitmen dalam: 1) pengembangan energi terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan, 2) meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta 3) meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional serta meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan.
- **Rekomendasi.** Perlu komitmen dalam melanjutkan 9 (Sembilan) kebijakan sebelumnya, terutama terkait dengan mencapai industri migas yang kuat dan tangguh, menghadirkan teknologi hemat energi dan merancang isu perubahan iklim tidak hanya untuk isu lingkungan melainkan juga untuk perekonomian

Tabel 6. Perbandingan Misi dan Program Jokowi-JK 2104 dan Jokowi-Ma'ruf 2019 terkait Energi Baru Terbarukan (EBT)

No	Visi dan Misi 2014 (Jokowi-JK)	Visi dan Misi 2019 (Jokowi-Ma'ruf Amin)
1.	Merancang terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan
2.	Merancang strategi yang dapat mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah	Meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional
3.	Mencapai industri migas yang kuat dan tangguh	Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan
4.	Menyusun strategi yang cerdas energi baru terbarukan	
5.	Membangun infrastruktur migas	
6.	Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah	
7.	Menghadirkan teknologi hemat energi	
8.	Merancang isu perubahan iklim tidak hanya untuk isu lingkungan melainkan juga untuk perekonomian	

Kesimpulan

- **Pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan**, tercantum dalam misi keempat yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam penjabarannya, terdapat 3 program aksi dan 12 (dua belas) butir kebijakan yang meliputi kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup. Namun tidak ditemukan upaya untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI), serta pemberhentian deforestasi,
- **Ketimpangan penguasaan lahan** secara umum tercantum dalam misi ketiga tentang pembangunan yang merata dan berkeadilan. Terdapat 6 (enam) butir kebijakan yang fokus pada permasalahan kemiskinan dan reforma agraria seperti percepatan redistribusi aset, pendampingan masyarakat, percepatan legalisasi (sertifikasi) serta meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan dan legalisasi tanah perkebunan rakyat. Namun dalam penjabarannya, tidak ditemukan upaya pengelolaan konflik tenurial dan penataan desa di kawasan hutan

- **Penegakan hukum**, tercantum dalam misi keenam tentang penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Terdapat 8 (delapan) butir kebijakan, namun tidak menyebutkan secara jelas tentang perizinan pengelolaan sumber daya alam. Dalam penjabarannya hanya menyebutkan pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi,
- **Perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat**, hanya ditumpangkan pada misi keenam terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Di sana disebutkan komitmen untuk melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal spek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari tanpa perincian seperti sebelumnya. Namun dalam penjabarannya tidak ditemukan pembahasan tentang Rancangan Undang-undang masyarakat adat dan hutan adat
- **Energi baru terbarukan**, tercantum dalam misi ketiga dan keempat dengan 14 (empat belas) butir kebijakan, diantaranya pengembangan energi terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan, meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil serta meningkatkan nilai tambah dan mengokohkan pengembangan EBT untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025. Namun tidak menyebutkan terkait dengan pertambangan, biodiesel, dan subsidi.

Rekomendasi

- **Terkait Pengelolaan hutan dan Gambut berkelanjutan**, perlu komitmen Jokowi-ma'ruf dalam melanjutkan 14 agenda-agenda sektor kehutanan sebelumnya, terutama terkait dengan Evaluasi dan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari, penyediaan data sumber daya hutan secara *de facto* dan *de jure* serta dapat memberikan kepastian berusaha berkeadilan, Tertib peredaran hasil hutan dan pencegahan kebakaran dan illegal logging, Pelestarian hutan pelestarian dan perlindungan 20,63 juta ha sisa areal yang masih berhutan serta perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, Rehabilitasi 100,70 juta Ha areal tidak berhutan, hutan tidak produktif dan lahan kritis serta Penataan rencana pemanfaatan 1,99 juta ha areal hutan yang belum terdata.
- **Terkait dengan ketimpangan penguasaan lahan**, perlu komitmen dalam melanjutkan kebijakan sebelumnya yaitu Pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha dan perhutanan sosial 12,7 juta Ha. Selain itu perlu upaya dalam pengelolaan konflik tenurial dan penataan desa di kawasan hutan.
- **Terkait dengan penegakan hukum**, perlu sebuah butir yang menyebutkan dengan tegas tindakan penegakan hukum untuk korupsi di sektor sumber daya alam, baik terkait perizinan di Kawasan hutan, tambang, dan lainnya
- **Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat**, Perlu tindak lanjut terhadap komitmen sebelumnya seperti 1) meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber - sumber agraria, 2) melanjutkan proses legislasi RUU pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, 3) Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU pertanahan dan lain-lain, 4) memastikan penerapan UU Desa 6/2014 berjalan.
- **Terkait dengan energi baru terbarukan**, Perlu komitmen dalam melanjutkan 9 (Sembilan) kebijakan sebelumnya, terutama terkait dengan mencapai industri migas yang kuat dan tangguh, menghadirkan teknologi hemat energi dan merancang isu perubahan iklim tidak hanya untuk isu lingkungan melainkan juga untuk perekonomian

Lampiran

Hasil Penelusuran Isu Berdasarkan Kata Kunci Terkait Lingkungan Berkelanjutan

No	Kata Kunci	Penjabaran Misi/Program/Program Aksi	Jumlah Pointer	Sumber	
				Hal	Poin
A. Pengelolaan Hutan dan gambut berkelanjutan					
1.	Hutan	Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran, guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi	5	13	3.1
		Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif		13	3.1
		Pencegahan kebakaran Hutan		18	4.2
		Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau		18	4.2
		Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta daerah aliran sungai (DAS),		18	4.3
2.	Gambut	Melanjutkan konservasi lahan gambut	1	18	4.2
3.	Kebakaran Hutan	Pencegahan kebakaran hutan	1	18	4.2
4.	Perizinan	Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov)	2	17	3.7
		Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tataniaga,		25	6.3

		keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya			
5.	Reforma Agraria	Reforma agraria juga menjadi bagian dari penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan dengan pemerintah	3	12	3.1
		Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran, guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi		12	3.1
		Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif		13	3.1
6.	Konservasi	Melanjutkan konservasi lahan gambut	3	18	4.2
		Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat		18	4.2
		Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta daerah aliran sungai (DAS),		18	4.3
7.	Rehabilitasi	Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta daerah aliran sungai (DAS),	2	18	4.3

		Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan akibat sampah plastik serta mendorong berkembangnya industri daur ulang		19	4.3
8.	Sawit	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
9.	Perhutanan sosial	Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran, guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi	2	13	3.1
		Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif		13	3.1
10.	Deforestasi	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
11.	Restorasi	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
12.	HTI	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
13.	Ilegal Logging	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
14.	Perambahan	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
B.	Ketimpangan Penguasaan Lahan		Jumlah Pointer	Hal	Poin
15.	Konflik	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
16.	Kemiskinan	Meningkatkan sinergi antar pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sentar-sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk menekan angka kemiskinan,	3	17	3.7

		mengurangi ketimpangan antar warga dan juga antar wilayah			
		Meningkatkan peran kelurahan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan perkotaan melalui penataan pengelolaan fiskal		17	3.7
		Money Follow Program dengan memfokuskan penggunaan anggaran untuk mengembangkan sektor unggulan daerah, upaya penurunan angka pengangguran, menekan kemiskinan dan kesenjangan		34	9.2
17.	Desa di Kawasan Hutan	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
18.	Reforma Agraria	Reforma agraria juga menjadi bagian dari penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan dengan pemerintah	3	12	3.1
		Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran, guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi			
		Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif		13	3.1
C.	Penegakan Hukum		Jumlah Pointer	Hal	Poin
19.	Korupsi	Melanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan	7	24	6.2
		Melaksanakan secara konsisten strategi nasional pencegahan korupsi yang fokus pada perizinan dan tataniaga, keuangan negara,		25	6.3

		serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.			
		Memperkuat Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)		25	6.3
		Meningkatkan sinergi dan kerjasama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi		25	6.3
		Menggiatkan transaksi nontunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi		25	6.3
		Penggunaan Zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, serta membangun model <i>Whistley Blower System</i> (WBS) yang dapat diterapkan di sentra-sentra pelayanan seluruh K/L		32	8.6
		Mencegah praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan keuangan		34	9.2
20.	Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan kepatuhan pelaksanaannya (Kebijakan satu peta) serta menindak tegas penyimpangannya	4	18	4.1
		Menata hubungan kerja pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan		33	9.1
		Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom dan daerah khusus/Daerah istimewa, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan		33	9.1

		keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat			
		Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta mensinergikan kepentingan antar kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing		33	9.1
D. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat					
21.	Masyarakat adat	Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat	2	18	4.2
		Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal spek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari		26	6.5
22.	RUU Masyarakat adat	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
23.	Hutan Adat	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
E.	Energi Baru Terbarukan		Jumlah Pointer	Hal	Poin
24.	Energi	Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta memperkuat struktur ekonomi menuju kemandirian	4	10	2.3
		Meneruskan program-program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai		10	2.3

		tambah untuk kemajuan perekonomian nasional			
		Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan		10	2.3
		Pengembangan energi terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan		18	4.2
25.	Infrastruktur	Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM dan perbaikan sanitasi, seperti tiap rumah tangga memiliki jamban, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia	9	4	1.2
		Mempercepat pemerataan penyediaan sarana-sarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya diseluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang		5	1.3
		Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.		9	2.2
		Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.		9	2.2
		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.		9	2.2

		Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan /tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah		9	2.2
		Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital		9	2.2
		Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya		10	2.3
		Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan		17	3.7
26.	Subsidi	Melanjutkan reformasi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran	1	15	3.4
27.	Pertambangan	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
28.	Polusi	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
29.	Biofuel	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
30.	Biodiesel	Tidak ditemukan	0	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Referensi:

Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Visi-Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2015. Jakarta, Mei 2014.

Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Visi-Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H Ma'ruf Amin, 2018.

Yayasan Madani Berkelanjutan. 2018. "Mengupas Status Hutan Indonesia". Jakarta, Agustus 2018.

[1]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151222141038-20_99866/jokowi-dapat-nilai-merah-soal-pengelolaan-hutan-dan-lahan

[2]<http://www.mongabay.co.id/2018/08/08/menilai-pelaksanaan-komitmen-jokowi-kepada-masyarakat-adat/>

[3] <https://nusantaranews.co/ini-kinerja-presiden-jokowi-dalam-mengurus-kehutanan/>